
INDONESIA NET ZERO SUMMIT 2023

It's Now or Never!

Sabtu, 24 Juni 2023

Djakarta Theater XXI, Jakarta

Sesi B1

“Deadline 2030: Cara Menggalang Triliunan Dolar untuk Dunia 1,5”

MODERATED DISCUSSION

Luthfyana Kartika Larasati (Climate Policy Initiative), Moderator:

Panel hari ini berjudul “Deadline 2030: Cara Menggalang Triliunan Dolar untuk Dunia 1,5°C”. Sebenarnya ada apa di 2030? Itu merupakan janji dunia, termasuk Indonesia, akan menjaga suhu di bumi ini kenaikannya tidak lebih dari 1,5°C. Harus ada apa sih untuk menjaga suhu tersebut? Harus ada aksi dan didukung dengan pendanaan. Menurut data dan juga laporan terakhir di COP-27, Indonesia per tahun perlu setidaknya 200 miliar US Dollar. Kemudian, untuk mencapai 200 miliar dalam satu tahun sampai 2030, pemerintah itu sudah berkontribusi kira-kira 34%. Seperti yang dikatakan Pak Luhut tadi pagi, kita harus bangga dengan pemerintah Indonesia sudah mendanai lebih dari sepertiganya untuk pendanaan iklim. Lalu, statistik untuk sektor swasta dan publik yang kita lihat baru sekitar 9 sampai 10%, *gap*-nya sangat besar.

Jadi, jika 34 ditambah 9 sampai 10% itu masih ada *gap* pendanaan sebesar 56-57% lebih dari setengahnya. Bagaimana menutupnya dan bagaimana kita bisa meng-*optimize* apa yang sudah dilakukan? Saya mau langsung bertanya dengan pakar dan partisinya yang pertama, Ibu Sylvi Gani dari PT SMI. PT SMI ini dimandatkan oleh kementerian keuangan Indonesia, ibaratnya tangan kanannya. Jika teman-teman tadi di sesi *ballroom* mungkin sudah mendengar Indonesia energi transisinya yang sedang diganggu-gaungkan, *energy transition mechanism* (ETM). Di G20 kemarin, PT SMI resmi dinobatkan sebagai ETM *country platform*, yaitu *platform* yang akan memobilisasikan semua pembiayaan iklim untuk program ekonomi Indonesia sehingga bisa mencapai target iklim di 2030 sesuai janjinya di *Paris Agreement*. Lalu, saya izin bertanya, PT SMI ini sebelumnya sudah berpengalaman memiliki *platform* namanya *SDG Indonesia One* (SDG IO). Jadi, jika teman-teman sering dengar SDG IO, inilah *platform*-nya Ibu Silvi, bentuknya *blended finance* — pembiayaan campuran antara publik dan swasta di *blend* oleh PT SMI untuk memobilisasi pendanaan iklim di Indonesia. Pertanyaan saya, PT SMI sudah dimandatkan jadi ETM *country platform* dan tidak hanya uang yang eee pendanaan, karena baru-baru ini ada *Just Energy Transition Partnership*. Mungkin Ibu Sylvi bisa menjelaskan karena ini sudah dikoordinasi dengan SDG Indonesia One. Peran PT SMI yang paling *impactful* untuk memobilisasi pendanaan iklim.

Sylvi J. Gani (PT SMI), Panelis:

Tadi sudah disebutkan PT SMI merupakan *special mission vehicles* dari *Government of Indonesia* kami didukung sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Jadi memang banyak tugas dan *assignment* dalam mencapai program-program pemerintah, salah satunya adalah *net-zero emission*. Kami dalam mendukung *net-zero emission* ini, yang *budget*-nya sudah disebutkan tugasnya adalah memobilisasi *funding* dalam mencapai *emission reduction*. ETM adalah tugas baru kami, tapi jauh

sebelum itu *under SDG Indonesia Sustainable Development Goals*, kami sudah memobilisasi *funding* — dari *public* maupun *private* — untuk proyek ramah energi. Jadi, sudah ada 67 *climate related project* yang sudah dibiayai oleh SDG Indonesia One *platform* kemudian tahun lalu kami juga dijadikan *country platform*. Kuncinya apa dalam mencapai *Energy Transition*? Tugas kami memobilisasi *funding* yang dibutuhkan dalam transisi energi ini dan juga untuk membuat financing modalities yang dibutuhkan untuk *energy transition*. Jika kita membahas transisi energi itu akan dibagi menjadi dua, yang pertama adalah *carbon reduction* dan kedua *clean energy development*. *Carbon reduction* itu tentunya *coal phase out* dan yang kedua pembangunan *renewable energy*. Dua-duanya membutuhkan *funding* yang sangat besar, sekitar 2 *billion USD*. Tugas kami di sini untuk bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* demi mencapai goal ini. Jadi dengan memobilisasi *funding* untuk mencapai *energy transition road map* pemerintah — Baik itu *phase out* atau pengembangan dan pembuatan *renewable energy*.

Luthfyana Kartika Larasati (Climate Policy Initiative), Moderator:

Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Said yang merupakan mitra bagi pemerintah. Bapak merupakan mitra pembangunan pemerintah baik di JETP dan *Energy Transition Mechanism* (ETM). Bagaimana peran dan komitmen *multilateral development bank* (MDB) seperti apa? Dan apakah ada jalan atau mekanisme tertentu sehingga Indonesia dapat mempercepat mobilisasi pendanaan dalam mencapai target iklimnya?

Said Zaidansyah (ADB), Panelis:

JETP ini adalah *the largest transition finance transaction in the world – 20 billion USD* — komitmen dari IPG dan G7 itu termasuk Norway dan Denmark untuk bisa mencapai beberapa target, diantaranya 34% *clean energy* di 2030 dan *coal phase out*. Sekarang sedang di *define* apa itu *scope* dari JETP *transaction*. *Landmark* itu kita harapkan hadir pada 16 Agustus, sehari sebelum Hari Kemerdekaan, akan diluncurkan *Comprehensive Investment and Policy Plan* (CIPP) yang akan mendefinisikan JETP *transaction* dan berapa banyak asal dari pembiayaan 20 *billion USD* ini akan dialokasikan, seperti pembiayaan 10 *billion dollar* dari pemerintah atau *Glasgow Financial Alliance for Net-Zero* (GFANZ).

Twenty billion dollar ini terasa besar, namun berdasarkan komitmen pemerintah untuk mencapai *Nationally Determined Contributions* (NDC) pada 2030, sebesar 31,8% dengan *Business-As-Usual* (BAU) dan 43,2% dengan *international support* dibutuhkan dana sebesar US\$280 *billion* sampai 2030. Jadi 20 *billion USD* ini besar tapi *it's a drop in a bucket in some ways*. Lembaga seperti ADB — Asian Development Bank, dimiliki oleh 28 negara, dan Indonesia adalah pemegang saham terbesar keenam. *In many ways*, ADB ini adalah bank milik Indonesia juga karena Indonesia merupakan pemegang saham terbesar keenam. ADB juga memiliki *presence* sejak 1987. Kita juga *one of the biggest provider of development finance*. Balik lagi, peran dari ADB adalah *convening power*, yakni dapat membawa berbagai pihak untuk bersama-sama duduk lalu memfasilitasi. Oleh karena itu ADB diminta oleh IPG members dan pemerintah Indonesia untuk memberikan *institutional support* maupun *implementation capacity* kepada JETP Secretariat.

Kedua, untuk mewujudkan komitmennya sebagai *the climate bank* di Asia-Pacific, kami menyiapkan dana sebesar US\$ 100 billion untuk *climate related transaction* sampai 2030. Kami juga menjadi *first mover* untuk *energy transition* di Indonesia. Kami menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan Filipina pada 3 November 2021 di COP26 dan itu yang kemudian menjadi genesis dari kerjasama ADB dengan Pemerintah untuk menciptakan ETM *Country Platform* — dimana PT SMI adalah

country manager-nya. Kami juga memberikan dukungan pada PT SMI *as needed as required* untuk menjalankan mandatnya sebagai *country manager*. Kami juga menjadi katalisator pendanaan dari berbagai pihak. Kami punya memiliki berbagai skema. Salah satu skemanya, yaitu SDG Indonesia One tapi *clean financing facility*, itu yang ADB dukung. Misalnya, kita memberikan dukungan pada rencananya 12–15 proyek dan kami siap memberikan *funding* yang bersifat konsesional tetapi dengan syarat *funding* ini mendapatkan *funding* dari pihak lain. *We try to catalyze our funding*. Sekarang ada skema baru yaitu *Innovative Financing for Climate in Asia Pacific* (IFCAP) yang mana kita mencoba meminta pendanaan dari berbagai donor dan *convening power* — dimana kita akan menjadi *honest broker* — yang nantinya IFCAP akan memberikan *guarantee* setiap dolar yang dijamin dapat *generate funding* yang dari pihak lain sebesar 4–5 dolar. Apa *added value* dari lembaga multilateral? *We are convening power, we are considered* sebagai *honest broker* kami memiliki *expertise* untuk menciptakan *innovative financing transaction* yang kemudian bisa kita *replicate* di negara-negara anggota kita lainnya.

Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari pemerintah Indonesia, dengan kementerian keuangan, PT SMI, Menkomarves, sebagainya. Dan akan kita *replicate* di negara-negara lainnya. ETM ini merupakan inisiatif yang sedang coba dikembangkan juga di Filipina, Vietnam, dan sebagainya. Kemudian, dari dukungan ADB kita akan melakukannya berdasarkan pengalaman kita di Indonesia.

Luthfyana Kartika Larasati (Climate Policy Initiative), Moderator:

Ini sektor publik yang sudah mendanai sepertiga dari pendanaan iklim di Indonesia. Saya ingin beralih ke sektor swasta, Bapak Pandu bergerak di sektor hijau. Electrum ini *two wheelers* dan dia juga ramah lingkungan. Saya mau tanya, Bapak sudah *first in the market* jadi peran apa yang bisa diambil swasta untuk mendorong pemerintah Indonesia mencapai target iklimnya.

Pandu Sjahrir (CEO Electrum), Panelis:

Dengan adanya gap tadi artinya swasta ½ kan? Berarti 10% ini akan berasal *most likely* dari swasta atau individu. Jadi jika membicarakan Electrum-nya, *very short answer*, kita coba menjadi bagian dari solusi transportasi tapi saya memang *passion*-nya soal udara. Saya dan keluarga *passion*-nya di udara, saya sempat bertanya di Instagram, “Apakah kita nyaman hidup di Jakarta?” Dan 6% bilang tidak, sekitar 3000. *That's actually a big problem to say Jakarta is not liveable. You know Jakarta, the GDP per capita is 15,000 – 20,000 GDP per capita. And Indonesia if you hear from Pak Luhut this morning, or whenever you hear in the morning, they probably say we want to go from G16 to G7 in the next 20 years*, bahasanya Indonesia Emas 2045. *And when you talk about that, then Indonesia should be at 10,000 – 12,000 GDP per capita for 300 million people and maybe Jakarta is about 40 to 50,000.*

Now what is Jakarta? You know, I talked about this yesterday in Malaysia. We were there at the AVPN and aku dongeng yang sama karena pertanyaannya sama tentang COP28 and 2030. So, going with this story, Jakarta itself might quadruple in GDP per capita in the next 2025 years, but that means our business in Jakarta has changed from service to high quality service and high value added service. Jadi sebenarnya di Jakarta ini is a place for high quality talent. When you talk about high quality talent, what matters most to high quality talent, quality of life, what matters and quality of life, air quality, access to good health care, access to education for each one of you. Benar kan?

But today Jakarta is number one in air quality — from the bottom. So that's a good thing. You know what the good thing is, you can't go any lower. You can only go up you know, so you know when you

talk about the cities. You know, just last week Julius Baer released, Jakarta is in the 12 most expensive cities to live in. But for the price you pay for those taxes, you get the worst air quality so you know, what do you think of that? Nanya dulu nih baru bahas tentang Electrum.

This is going to be a fact, in the next 10 years, your life will be taxed. You most likely will pay tax on the air you breathe, on water or even air that you will pay for that tax and there'll be a cost of doing business and a cost of living. So like it or not, to contribute to your climate change question, the private sector — each one of us — will have to bear that cost. And what the government will do to fill the gap, like it or not, whoever's in the government, they will do this as an eventuality. They'll increase tax on living. They'll increase tax, behavior tax, they'll also probably increase for corporations. Pajak pasti akan naik. Then this is to shift human behavior. That's why menurut saya, it's the cost of doing business. I have to do this.

Aku gamau munafik. Saya mulai dari TBS (re: Toba Bahtera Sejahtera) yang batu bara dan pmebangkit listrik batu bara. Pada tahun 2019 – 2020 kami jual Paiton, pembangkit listrik paling besar di Indonesia. Uangnya untuk bangun Electrum. Sekarang bisnis kita jadi tiga untuk 6 tahun kedepan, yaitu untuk Electrum, kedua untuk *renewable energy* dan *carbon credit*, dan ketiga untuk *waste management*. Menurut saya ini akan banyak *impact* ke masyarakat dan jika saya hitung-hitung Electrum *is about 1 billion USD, it's public knowledge. It's a massive shift going from coal to non coal. My older brothers are also shifting*. Jadi, mungkin ada yang bilang batubara merusak – well, kita hidup dengan murah dari sana tapi untuk berubah. Jadi kita lihatnya bagaimana kita mengubah *spending* kita untuk antisipasi gerakan pemerintah 5 sampai 6 tahun kedepan, di lokal maupun level nasional.

Q&A SESSION

Luthfyana Kartika Larasati (Climate Policy Initiative), Moderator:

Jika saya rangkum, kita harus *adapt* harus *shift way of thinking* kita dari yang dulunya tinggi karbon tapi *lower cost living* ke *lower carbon* sehingga harapannya kita dapat untung yang lebih tinggi. Mari kita buka sesi diskusi.

Surya (Indonesia Research Fellow, Global Institute for Sustainable Prosperity):

Kira-kira *concessional loans* dalam JETP adalah dana yang diberikan oleh ADB kemudian apa itu *guarantees*? Untuk Ibu Sylvi, kira-kira dari pihak SMI apa saja proyek *Just Transition* yang sudah dilakukan? *Just Transition* itu apa saja? Untuk Bapak Pandu, pantas berbahagia, karena Indonesia melibatkan swasta dalam kebijakan hijaunya. Jika ada permintaan untuk pemerintah kira-kira apa lagi, Pak? Terima kasih.

Said Zaidansyah (ADB), Panelist:

Untuk JETP sendiri komitmennya adalah *20 billion USD which is drop of the bucket* dari kebutuhan Indonesia *to achieve the NDC by 2030*. Sekarang berapa persen *guarantee, commercial funding, concessional funding* yang sedang disusun? Sebagai informasi ada 4 *working groups* yang membahas cara mengimplementasikan JETP *political declaration* yang di *issue* pada tanggal 15 November 2022 dalam G20 Summit *under Indonesian Presidency*. Salah satu working group adalah *financing working group*, dimana ADB itu termasuk salah satunya. Ini adalah *ongoing work* yang sedang kita lakukan.

Bagian dalam *concessional* dan *guarantee* menjadi bagian yang dilakukan oleh IPG members dan sisanya akan dilakukan oleh GFANZ dan *private sectors*. Saat ini, dari 20 billion US dollar rencananya 10 billion US dollar dari publik dan 10 billion US dollar dari *private*. *I wish I can give you a more definite answer* tapi *the work is still ongoing, the target is to launch the CIPP* yang akan mengandung informasi ini pada tanggal 16 Agustus 2023. Saya juga perlu sampaikan bagi temen-temen yang membaca JETP *political declaration*. Target itu bukan dari tanggal summitnya, tapi dihitung dari tanggal peluncuran JETP *Secretariat*, yaitu 16 Februari 2023.

Sylvi J. Gani (PT SMI), Panelis:

Just Transition, lebih tepatnya Pak ADB yang menjawab karena memang konsep *just transition* dari government Indonesia di *assist* oleh ADB untuk menjadi *just transition*. Kami dari PT SMI lebih *project-to-project basis* secara *policy* Pemerintah di *assist* oleh ADB mengenai konsep ini. Tapi *Just Transition* ini adalah *energy transition* yang memperhatikan *positive impact* terhadap *social* dan *economy*. Jadi, kami dalam melakukan *climate change initiative* ini harus mengukur impactnya terhadap kedua hal tersebut. Misalnya adalah *coal phase out*, tidak bisa langsung ditutup sehingga harus dihitung impactnya terhadap komunitas sekitar dan ekonomi. Bagaimana menutup *coal power plant* ini terhadap sektor yang terimbas? Tidak hanya di lokasi *coal fired power plant* beroperasi, tapi dirunut sampai sumber batu baranya, *impact*-nya bagaimana? Kemudian untuk *social impact*, jika ditutup sedangkan komunitas lokal sudah terbangun, ada warung-warung, ada supply chain nya, bagaimana hal ini mempengaruhi komunitas yang sudah terbangun tersebut? Hal ini yang perlu diukur dan menjadi *decision making* dari aktivitas energy transition ini.

Pandu Sjahrir (CEO Electrum), Panelis:

Dari transisi energi, 50% of the battle ada di sisi kebijakan dan implementasi. Contoh yang lagi hangat adalah pembelian motor listrik. Jika regulasi dan implementasi dibuat manusia, tinggal eksekusi. Jika ada masalah di *solve* saja. Kita juga rajin berkomunikasi dengan pemerintah di berbagai sektor — motor listrik, *carbon credit*, *renewable energy* — jadi semuanya controlled by kita-kita semua.

Secara pragmatis, untuk motor listrik *the biggest risk is conversion. Conversion will happen but how fast? The government says 50% of motor listrik, by 2030, is all about conversion. The biggest issue for private capital in the motor listrik industry is conversion*. Akan ada pertanyaan, *secondhand*-nya bagaimana? Kita tidak tahu karena belum ada yang dijual. Kita baru menjual 3000 motor, *that's the biggest in Indonesia. So, then, it's all about conversion. There are 2 sectors where the government could step in*, satu soal *secondhand* dan kedua soal asuransi. Terakhir adalah soal *safety* dari baterai. Di India banyak sekali yang meledak-ledak sampai bulan lalu pun ada yang meledak. Jadi, *safety standards from batteries are very important because your butt sits on that battery. Last thing you want is that thing blowing up on you, it won't be a pleasant experience*. Jadi itu harus dipikirkan, tidak bisa hanya bilang, “harga paling murah!” Bisa saja paling murah, tapi nantinya akan mahal (imbas ke diri sendiri).

Saya jujur saya, ini penting dari sisi mindset dan dari pemerintah harus bisa bantu untuk kedua hal ini. *Safety is everything to get conversion to happen, 1 meledak it's over. Di India, you can google this, satu apartemen pernah kebakaran karena mereka menggunakan baterai bekas motor. So, let's learn from what they've done in China and India – and how we can do it much better*. Itu yang harus kita komunikasikan kepada Pemerintah dan *gap* yang tidak bisa kita *solve* sebagai *private sector*. Terakhir *carbon credit*, ada dua standar yang sedang berperang, ada dunia Eropa, dan dunia Amerika. In Indonesia, *we are still a user of capital, we are not a provider of capital. And again, when you talk*

about carbon, it's actually venture risk. It's very risky, what are you selling in carbon? If you want to do it, you have to make it an open market — it has to be more American. Why? Because Europe is the one setting it and like it or not they are providers of capital. Mereka menggunakan capital untuk bilang, "Ikuti standar gue." We are users of capital, let's find what's best for Indonesia.

Luthfyana Kartika Larasati (Climate Policy Initiative), Moderator:

Mungkin saya sedikit *wrap up* jawaban dari Bapak dan Ibu di sini. Kita harus menjaga *upstream* dan *downstream* kita, provider dan *user* semuanya dijaga, baik Pemerintah maupun *private*. Perlu komunikasi yang *open* dan *honest* sehingga kita mencapai target iklim yang sama.

Ridwan (NVU – Startup builder di bidang Sustainability):

Saya Ridwan dari NVU, berbasis di Rotterdam. Pertanyaan saya untuk Pak Said, terkait *catalyst funding*, apakah ada *success story*? Kedua untuk Pak Pandu, saya *concern* juga dengan polusi udara. Setiap pagi saya cek aplikasi nafas sangat membantu banget. Saya *background*-nya *engineering* mengumpulkan teman-teman dari *mechanical* dan sipil untuk mengerjakan *air purifier* secara *city scale*, sudah ada di Beijing dan Singapore. Sepertinya hal ini bisa jadi solusi soalnya skala rumahan udah mulai *aware*. Saya penasaran sama Pak Pandu sama ide tersebut?

Said Zaidansyah (ADB), Panelist:

How to walk the talk agar visi menjadi aksi. Kami dari ADB memiliki beberapa *innovative financing mechanism* yang sudah kita jalankan seperti *ASEAN Catalytic Green Financing (ACGF)*. ADB memberikan pendanaan dan ada pendanaan dari 8 sumber lainnya. Misalnya, ACGF ada 1,8 billion USD yang bisa di *mobilise* oleh ADB, saya lupa spesifikasinya berapa, sekitar 200-300 juta USD yang *financing commitment* bisa *dimobilise* untuk *loan*. Ada *window* untuk *technical assistance* ada *window* untuk *loan*. Hal itu bisa kita dapatkan dari 9 *funding sources* termasuk ADB. Dana ini nanti dipakai untuk *financing project* lainnya di ASEAN. Diharapkan dana yang dipakai dari *fund* tadi itu bisa kita kita biayai proyek yang bisa *catalyst* itu. Artinya, *when ADB finance a project at country level*, maka project tersebut akan bisa mendapatkan *funding* dari sumber-sumber lain. Indonesia sebagai bagian dari ASEAN juga memiliki *finance* di SDG Indonesia One green financing facility dengan Ibu Sylvi. Kita akan kasih 150 million USD da kita harapkan dengan jumlah tersebut kita dapat membiayai proyek 600 million USD. Kita sudah punya kerjasama dengan PT SMI, kita *identify potential* proyek-proyek dan mencoba melakukan taksonomi dengan *green infrastructure*. Jadi, *green financing facility* bantu untuk membiayai *green infrastructure*. ETM pun sama, *catalyst funding*.

ETM dari ADB bentuknya regional. Kita juga membuat ETM partnership fund, kita *mobilise funding* dari bilateral maupun *philanthropy* yang dapat membiayai proyek-proyek transisi energi di negara-negara anggota ADB. Sekarang, ADB sedang memobilisasi *funding* dan secara aktif sedang mencoba membiayai 1 transaksi transisi energi untuk mendukung proyek di Cirebon. *We don't try to finance the whole thing*, tapi kami harap ada sumber pembiayaan dari *private financial institution*. Mereka akan melihat adanya ADB dan mereka akan mau untuk masuk. Itulah contoh-contoh ADB untuk bisa *catalyst funding*.

Pandu Sjahrir (CEO Electrum), Panelis:

Tadi pertanyaan terkait kualitas udara di foundation keluarga kami, Paloma Sjahrir, kerjasama dengan University of Chicago. *They make air quality index* untuk Indonesia. *We made them do a study in Indonesia*. Saya agak sedih karena kita rangking 2 dari 240 negara dari kualitas udara terburuk, saya kira nomor 1 — *unfortunately, we didn't get it this year*. *Jakarta is much worse in an Indonesian level*

and the life expectancy goes down by 5 ½ years. Alasan saya melakukan ini, 2024 akan election dan di tahun 2014 China bilang, “War against pollution.” dan India bilang hal yang sama di 2019. To be honest, I don't like war. I'm a lover not a fighter, so what I want to see in 2024 is I just want freedom against pollution. Sepertiga dari kalian di ruangan ini masih memakai masker bukan karena COVID tapi karena poor air quality. Saya Ingin kita semua setuju agar 2024 kita bergerak dan merdeka melawan polusi. For that, what you're doing is correct, jika di India & China war against the pollution, apakah kita bisa punya UU Udara Bersih? They have a clean air act, how come we don't do it? Kapan kita punya? It's a sign from a developing market to a well developed market. If you believe that you can do it, we can have this act. So, we as a society should insist on that. Pak Dharsono (CEO PT Rimba Makmur Utama) is big on carbon market, so i'm sure he'll be supportive. Jadi menurut saya what you're doing is you're in the right market because the total addressable market is huge. If you're looking at what the government and non governmental organizations are trying to do, the market is monetizing bigger and bigger. How do you do it effectively in a cost-effective manner?

Luthfyana Kartika Larasati (Climate Policy Initiative), Moderator:

What I can conclude from this panel is we need to work hand-in-hand, so we have a streamlined coordination Between the government, the private sector and us as a community.

Closing Remarks from A/S Jennifer R. Littlejohn:

This was a great discussion of the amount of financing essential to achieve the goal of limiting Global temperature rise to 1,5 degrees Celsius. I think we all understand it to be enormous. Our panelists have offered some useful suggestions on how to generate these funds and how they can be deployed productively. They remind us that even in this challenge — it is a great challenge. The International Energy Agency tells us that the world needs to invest trillions in this transition and every single year for decades but it is difficult to conceptualize such a large amount of money. What is obvious is that no government on Earth, and I'll say that, again, no government on Earth can fully fund that transition. But the private sector can help us do so. Raising ambition in emerging markets requires us to work together.

The good news is that we are doing that and we're doing that right here in Indonesia. Indonesia's commitment to an accelerated clean energy transition in Bali last November. The just energy transition partnership or JETP is an example of that. And we've heard a little bit about that today. JETP is a groundbreaking long term partnership that will accelerate Indonesia's power sector transition from fossil fuels to clean, sustainable energy sources and help to keep up the one and a half degrees Celsius global warming goal within our reach. The total financing needs of the energy transition in Indonesia exceed what any single country or even group of countries can provide. That is why the ultimate goal is to create the conditions that enable and encourage the private sector to come in on a larger scale with investments. And with those investments bring innovation and technology.

Now I'd note that those conditions include a level playing field for renewable energy and streamlining and increasing transparency in investment processes to achieve JETP's goals, the international partners group, co-led by the United States in Japan intends to mobilize an initial \$20 billion in public and private financing over a three to five year period, all for Indonesia. JETP will not be able to cover everything on Indonesia's to-do list, but it is a lot of money. Roughly half will come from the donor governments and half from the private sector. We are using a mix of grants, concessional loans, market rate loans, guarantees and private investments.

Together we are accelerating Indonesia's transition to a modern green economy and this is good news — dramatic new and better jobs in the energy sector to promote cleaner air as was discussed earlier, and reduced greenhouse gas emissions. This is good for Indonesia, good for its neighbors and good for the world. The JETP benefits everyone and the work has already started. Last month the JETP Secretariat announced the first new project to grant a million dollar grant for Indonesia's PT Medco power to fund a feasibility study for a 111 megawatt wind power plant in West Nusa Tenggara.

This is just the beginning. JETP is one example of what we need to do to attract private sector investment. But we can't simply expect the private sector to show up and solve all of our problems. On the contrary, our governments and institutions have important roles to play to set the conditions for private sector investment. Philanthropic partnerships also have a key role to play. The Global Energy Alliance for people and planet and other global philanthropies have pledged to pledge half a billion dollars to help replicate these energy transition models around the world driving enhanced implementation and enhanced ambition. An important part of the solution however is that governments and development finance institutions must play a key role in mitigating the risks associated with investing in emerging markets and developing economies. This requires actions from countries seeking investment.

It will be frankly important to strengthen governance, transparency, resource management and other aspects that constitute a positive investment in the environment. In addition, like minded partners need to find creative ways to increase the amount of funds available. Let me tell you what the United States is currently doing. For our part, we are deploying some of our grant funding and engaging our own government agencies, other development finance institutions and philanthropies to support innovative blended finance structures. We are looking at how we can deploy new financial instruments to guarantee purchase agreements for things like power and electric vehicles to free up more local lending capacity. And working with USAID we are putting out a call for proposals to provide competitive grants for novel private sector blended finance investment facilities. We also need multilateral development banks and other development financial institutions to play their part. And they can make a huge difference by engaging countries providing technical assistance and incentivizing policy changes that will improve the overall investment climate by generating more deals by helping investors better evaluate risks in emerging markets and by buffering the risks that prevent the private sector from coming in. And we need the private sector at the table taking a closer look at emerging markets and clean technologies.

All of us together need to find a way to start replicating and scaling out successes much more rapidly. To conclude, finding that trillion dollars for the 1.5 degree Celsius world requires us to be creative, work together, use every tool available to us and probably create a few new tools. Our hope is that the JETP will be a model that can be applied and that our efforts in Indonesia will celebrate the country's transition to a green economy. It's a journey we are making together. And I wish you all the best and thank you so much for your time.